

Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi (Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)

**Ray Naldi Manoi ¹
Ismail Rachman ²
Ismail Sumampouw ³**

ABSTRAK

Pemerintah Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro menjalankan roda pemerintahannya selama satu tahun sejak di lantik oleh pemerintah Daerah pada September 2019, berdasarkan Visi Misi yang disampaikan Kepala Desa/Kapitalau pada saat pencalonan dirumuskan kedalam RPJM Desa maupun RKP Desa. Peneliti mendalami Kinerja Kapitalau dalam Mewujudkan Visi Misinya, dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Lalu melakukan penilaian kinerja dalam hal produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dalam hal Indikator Produktivitas, bahwa pemerintah desa sudah menjalankan setiap tahapan program telah berjalan baik, serta melibatkan masyarakat atau menggunakan sumber daya manusia. Akan tetapi program yang diwujudkan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat. Indikator Kualitas Layanan, bahwa pemerintah desa belum optimal dalam pemberian layanan sehingga kualitas layanan. Indikator Responsivitas, pemerintah desa Tapile cukup baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat walaupun kebutuhan yang ada belum secara keseluruhan menyentuh pribadi masyarakat dan pemerintah desa dalam hal ini kurang efektif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Indikator Tanggung Jawab, pemerintah desa Tapile masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi yang ada. Indikator Akuntabilitas, pemerintah desa dinilai kurang akuntabel. Jadi dapat disimpulkan kinerja kapitalau dalam mewujudkan Visi Misi dinilai sudah baik tetapi lebih dimaksimalkan kedepannya agar bisa melihat apa yang menjadi prioritas kebutuhan utama masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, Kapitalau, Visi-Misi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

1. Latar Belakang

Salah satu juga upaya mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat, daerah, maupun desa, bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, maka dari penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan visi misi yang memberikan focus dan arah bagi organisasi secara keseluruhan termasuk bagi kinerja organisasi maupun kinerja dari seorang pemimpin. Berbicara penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian yang terpenting yang harus diperhatikan oleh pemimpin khususnya kepala desa dalam menjalankan visi misi yang sudah direncanakan. Visi dan Misi seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa merupakan sebuah mimpi yang perlu direalisasikan, untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi yang sudah disusun pada saat pencalonan Kepala Desa tentu harus diwujudkan dalam kepemimpinannya ketika terpilih yang perlu ditetapkan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan kemudian dirumuskan kedalam program kerja.

Penempatan program kerja tentu harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) karena rancangan RPJM Desa memuat penjabaran Visi Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan Rencana Kerja Desa (RKP Desa) yaitu rencana kegiatan prioritas yang akan diwujudkan 1 tahun berjalan, upaya pencapaian sesuatu menurut kebutuhan baik kebutuhan yang mendesak dari masyarakat maupun untuk percepatan kemajuan Desa yang diprogramkan.

Keberhasilan dan kegagalan program pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat keteladanan kepemimpinan Kepala Desa terkait kinerjanya, yakni seberapa jauh Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, dan pelaksana mempengaruhi masyarakat untuk berkembang dan ikut berpartisipasi dalam program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sasaran penelitian di desa Desa Tapile merupakan Desa Swakarya yang terletak di Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Tapile merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Buhias sekitar tahun 1992. Untuk sampai ke Desa Tapile warga bisa menggunakan perahu dari Pasar Ulu Siau dengan jarak 11,1km dan waktu tempuh 30 - 45 menit jika kondisi laut dalam keadaan tenang tetapi dalam keadaan bergelombang bisa sampai 1-2 jam. Desa Tapile memiliki beberapa potensi desa yang mampu menopang ekonomi masyarakat seperti potensi pertanian, kelautan/perikanan, dan pariwisata. Dalam sektor pertanian desa Tapile memiliki paling banyak pohon kelapa dan beberapa pohon pala sebagai salah penunjang mata pencaharian beberapa warga yang ada.

Dalam sektor kelautan/perikanan desa Tapile memiliki keindahan laut yang masih terjaga, perairan yang jernih sehingga kelestarian terumbu karang di dasar laut tampak jelas dan memiliki berbagai jenis ikan masih begitu banyak dan dalam sektor pariwisata desa Tapile memiliki objek wisata pantai, yang paling unggul yaitu pasir putih Pulau Mahoro yang berada kurang lebih 1km dari desa Tapile serta pemandangan perbukitan di pulau-pulau lain di sekitar Tapile.

Pemerintah Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sudah menjalankan roda pemerintahannya selama satu tahun sejak di lantik oleh pemerintah Daerah

pada September 2019, tentu setiap Visi Misi yang disampaikan Kepala Desa/Kapitalau yakni Bpk. Mangadil Mandak,S.Pd pada saat pencalonan sudah dirumuskan kedalam RPJM Desa maupun RKP Desa. Pada observasi awal peneliti menemukan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program apa saja yang dirumuskan dalam RPJM Desa maupun program prioritas RKP Desa ditahun 2020, peneliti ingin mengetahui lebih dalam apa yang membuat masih ada masyarakat yang tidak mengetahui program yang akan dijalankan apakah karena kurangnya partisipasi atau sikap apatis terhadap apa yang dijalankan pemerintah desa, atau apakah memang dari pemerintah desa sendiri dalam hal ini kapitalau kurang melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan maupun pada musyawarah yang ada.

Peneliti juga menemukan kurangnya transparansi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ketika adanya wabah Covid19 di tahun 2020 karena Anggaran yang ada dipangkas untuk menangani Covid19 sesuai dengan intruksi pemerintah pusat dan anggaran yang sudah ditetapkan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui baliho anggaran pengalokasian APBDes tentu terjadi perubahan. Yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaporan atau pertanggung jawaban anggaran APBDes ketika dipangkas untuk Covid19, tentunya harus diinformasikan kembali kepada masyarakat agar terciptanya transparansi dan hal ini bertolak belakang dengan salah satu point visi misi yang sudah disampaikan Kapitalau, yaitu ingin membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan dua sistem, *Sistem Demokratisasi dan Transparansi*.

Ini berpengaruh terhadap kinerja Kapitalau sendiri untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah yang ada. Informasi kondisi ini perlu diutarakan kepada masyarakat desa, agar masyarakat bisa menilai sejauh mana kinerja Kapitalau dalam mewujudkan Visi Misi yang ada

dan nantinya menjadi acuan kedepannya bagi pemerintah desa terlebih Kapitalau untuk menilai seberapa besar kinerja kepemimpinannya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul "Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro"

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang, dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian kinerja kepemimpinan kepala desa. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan masukan dan menjadi acuan kepada pihak pemerintah terlebih kepala desa di desa Tapile kedepannya.

Kerangka berpikir ini berdasarkan teori dari A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013) indikator pengukuran kinerja dilihat dari dua factor yaitu: Kemampuan dan Motivasi. Kemampuan sebagai keadaan yang dimiliki seseorang sehingga memungkinkan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keahlian dan ketarampilannya. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri aparatur secara terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Dengan demikian, pimpinan dalam hal ini seorang kepala desa merupakan orang yang bertanggung jawab dan mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dialami atau ditemui didalam masyarakat yang dipimpin. Agar dapat membimbing maupun

menggerakkan orang lain, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan daripada orang yang dipimpinnya, serta harus siap menerima secara sukarela setiap masukan dan kritikan dari masyarakat sehingga apa yang diharapkan kedepannya melalui kepemimpinannya dapat terwujud atau sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat serta situasi situasi. Tempat yang di ambil dalam penelitian ini adalah di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala desa tersebut, maka digunakanlah indikator teori Dwiyanto (2008: 50-51) tentang pengukuran dalam menilai kinerja birokrasi publik yaitu: 1) Produktivitas; 2) Kualitas layanan; 3) Responsivitas; 4) Responsibilitas; 5) Akuntabilitas.

2. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Operator Desa Tapile peneliti mengetahui Visi Misi dan juga program. Visinya adalah "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Perikanan, Pertanian, Aman Dan Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Makmur Dan Sejahtera". Misinya adalah "Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk hal ini, dua sistem yang di bangun yaitu system Demokratisasi dan Transparansi. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Membangun sumber daya manusia . Dalam mewujudkan Visi Misi yang ada maka dari itu dirumuskan ke dalam RPJMDes atau RKPDes yang akan dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan patokan alokasi anggaran APBDes yang sudah direncanakan dalam musyawarah desa,

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti membahas

hasil penelitian dengan menggunakan teori Dwiyanto (2008: 50-51) tentang Indikator pengukuran dalam menilai kinerja birokrasi public, sebagai berikut :

a. Produktivitas

Secara umum arti produktivitas adalah kemampuan setiap orang, system atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang di inginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien serta Produktivitas dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Berkaitan dengan hal yang dimaksud dengan input adalah bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada dalam tahap perencanaan program dalam mewujudkan visi misi sedangkan output yang dimaksud adalah apakah hasil sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai penjelasan serta hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kapitalau/Kepala Desa sudah berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat atau menggunakan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan ketentuan dalam setiap tahapan perencanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi. Pemerintah berupaya secara maksimal mungkin untuk melibatkan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan juga penggalan gagasan pada tingkat dusun atau lindungan melalui kepala dusun sampai dengan musyawarah desa untuk menetapkan skala prioritas pembangunan desa.

Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Tapile dalam upaya memberikan informasi bahkan setiap alur perencanaan pembangunan desa, dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan dapat melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam setiap proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Peneliti juga melihat dari hasil wawancara, ditemukan ada beberapa masyarakat yang masih bersikap apatis dengan apa yang dilakukan pemerintah Desa, hal yang membuat masyarakat apatis salah satunya mereka masih terbawah dengan

suasana pilkades yang telah berlalu dimana terjadi perbedaan pilihan, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Kapitalau/Kepala Desa agar terciptanya kebersamaan tanpa perbedaan untuk membangun desa bersama, yang membuat masyarakat tidak mau berpartisipasi juga yaitu ada beberapa masyarakat yang terbiasa dengan istilahnya uang duduk ketika diadakannya sosialisasi sehingga mereka kurang terlibat jika ada musyawarah tanpa uang duduk. Kapitalau juga sudah berusaha bersifat terbuka yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pemerintah juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung pada setiap pembangunan yang ada.

Sehingga melalui apa yang dilakukan pemerintah saat ini peneliti melihat hasil yang dicapai mewujudkan visi misi sudah bisa dikatakan menuju ke lebih baik karena sudah ada beberapa program kerja yang tercapai misalnya dalam pembangunan fisik ; Pelebaran jalan umum dan pengaspalan, drainase, pembangunan Sekolah TK/PAUD, rehap rumah tidak layak huni, rehap kantor desa, serta pembangunan sarana air bersih, pemerintah juga melaksanakan program penyuluhan perikanan tetapi hasil atau produksi ini masih dikatakan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat yang ada karena dari visi misi yang disampaikan bahkan sudah dirumuskan kedalam program kerja, peneliti menilai visi misi yang ada lebih ditekankan tentang misalnya mensejahterakan masyarakat yaitu seperti visi yang disampaikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan, pertanian. Dalam hal ini bahwa pemerintah desa Tapile belum mewujudkan visi misi dibidang perikanan pertanian, jika melihat program yang sudah dirumuskan tentu itu semua bisa mensejahterakan masyarakat karena yang terjadi dimasyarakat sendiri masalah yang dihadapi yaitu masyarakat kekurangan peralatan atau fasilitas dalam

menunjang mata pencaharian mereka itu semua juga karena faktor ekonomi. Melalui wawancara dengan kapitalau bahwa beberapa program kerja di pangkas karena alokasi anggaran dana desa difokuskan untuk menangani covid 19 dan diganti dengan beberapa program yaitu pemberian sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menunjang Program Keluarga Harapan. Pemerintah sudah berupaya untuk bisa menghasilkan pembangunan dalam mewujudkan visi misi dengan baik, namun belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat yang ada. Adapun yang menjadi problematika dari pemerintah desa sendiri bahwa melalui hasil wawancara masyarakat kurang terlibat dalam memberikan usulan program, ide program yang ada kebanyakan dari pemerintah sendiri, masyarakat hanya hadir begitu memenuhi undangan dalam musyawarah tetapi hanya duduk diam saja nanti menunggu usulan dari pemerintah terlebih dahulu, memang partisipasi masyarakat sangat aktif dalam hal pembangunan desa, mereka berbondong-bondong dan antusias dalam bekerja ketika tenaga mereka dibayar dari dana desa namun masyarakat desa Tapile dalam budaya secara gotong royong seperti dahulu sudah hilang, mereka sudah terbiasa atau bisa dikatakan manja dengan anggaran yang ada sehingga masyarakat sendiri ada yang merespon apa yang dilakukan pemerintah desa, ada masyarakat yang tidak mau tahu apa yang dilakukan pemerintah desa. Peneliti menilai hasil produktivitas ini dapat maksimal ketika setiap unsur yang ada aktif terlibat dalam tahap perencanaan pembangunan untuk menunjang mewujudkan visi misi yang ada dan jika program yang sudah dirumuskan itu dilaksanakan dengan baik maka akan tercapai suatu gebrakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Kualitas Layanan

Menurut ahli Ekonomi Philip Kotler, Kualitas Layanan adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, kemampuan

yang tinggi adalah sesuatu yang harus diwujudkan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan Kapitalau/Kepala Desa dan perangkat desa dalam memberikan pelayanan baik administrasi maupun pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan apa yang dilakukan. Melalui penelitian yang dilakukan, bicara soal kualitas layanan ditemukan bahwa pemerintah desa belum optimal menggapah belum optimal karena dilihat dari pemberian pelayanan secara administrasi bahwa Kapitalau/Kepala Desa sendiri mengatakan dari hasil wawancara beliau bisa dikatakan kewalahan dimana hanya beliau yang selalu diminta masyarakat misalnya dalam administrasi keluarga hal pembuatan surat menyurat, perangkat desa sendiri belum mampu untuk mengoperasikan komputer dan peneliti juga melihat dari sekretaris desa yang sulit dijangkau karena tempat tinggalnya berada di desa lain, sehingga ketika kepala desa ada urusan keluar tidak ada yang bisa membuatnya, ini kemudian membuat pelayanan kepada masyarakat lambat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Informan yang menjadi penunjang kualitas layanan pemerintah desa itu salah satunya juga adalah kantor desa, dimana kantor desa ini merupakan tempat masyarakat untuk datang ketika ada kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah desa tetapi kondisi Kantor Desa Tapile tidak layak ditempati dan membuat fasilitas desa seperti Komputer, Dokumen Desa dan lain-lain harus di simpan di rumah Kapitalau maka dari itu Kapitalau menetapkan harus direnovasi lagi agar setiap pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan di kantor desa. Kapitalau/Kepala Desa terus berupaya untuk dapat melibatkan perangkat desa dalam menunjang kepala desa agar masyarakat dapat dilayani dengan baik dan menyatakan puas dengan pelayanan pemerintah desa Tapile yang menjadi penyebab perangkat desa kesulitan dalam menggunakan teknologi yang ada karena keterbatasan

sumber daya manusia dimana ada beberapa perangkat desa berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan segi pembangunan infrastruktur desa, kepuasan masyarakat dengan hasil yang sudah dibuat oleh pemerintah desa sudah dikatakan baik karena memang sudah ada hasil yang terlihat.

c. Responsivitas

Responsivitas menurut Dwiyanto (2008 : 51-52) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun, agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini dibahas mengenai sikap tanggap dari pemerintah desa Tapile untuk membantu masyarakat terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, aspirasi mereka.

Dalam penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa pemerintah desa Tapile sudah dikatakan cukup baik menjawab setiap kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat, tetap melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah pengambilan keputusan, dan berusaha untuk meminta kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa agar visi misi yang ada dapat terwujud dengan baik. Menurut salah satu informan bahwa pemerintah desa Tapile kurang inisiatif ketika di desa Tapile terjadi perkelahian warga dimana pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa yang bertugas sebagian polisi keamanan kurang terlibat dalam hal mengamankan ketika terjadi perkelahian dan juga ketika diperhatikan melalui wawancara dengan salah satu informan bahwa kapitalau kurang kedekatannya dengan masyarakat yang ada misalnya seharusnya kapitalau sendiri bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat ketika selesai bertugas di kantor desa, ini boleh di jadikan strategi untuk menggali setiap

usulan program kedepan barangkali melalui komunikasi yang ada bisa muncul usulan dari masyarakat tersebut istilah dalam hal ini kapitalau jemput bola jangan hanya menunggu dari kerja perangkat sehingga peneliti menilai bahwa kepala desa masih kurang efektif dalam menjalin hubungan yang baik dan dekat dengan masyarakat, melalui observasi bahwa kepala desa dan masyarakat hanya sebatas hubungan secara struktural tetapi belum terjalinnya hubungan secara emosional yang baik.

d. Responsibilitas

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas juga mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Pada indikator ini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, dalam hal ini apakah pemerintah desa Tapile sudah melakukan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa pemerintah desa Tapile masih kurang karena pemerintah desa belum sepenuhnya dalam memahami setiap tugas pokok dan fungsi masing-masing penyebabnya pemerintah hanya bekerja begitu saja yang terpenting mereka hadir dalam setiap kegiatan pembangunan mereka bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini keterlibatan perangkat desa dalam menunjang kepala desa kurang karena dilihat dari membantu urusan administrasi surat menyurat, perangkat desa sendiri belum mampu mengoperasikan fasilitas elektronik yang ada dan dari kepala desa sendiri dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa terdapat kesulitan yang dialami yaitu harus belajar dari awal

karena tentunya latar belakang Pendidikan kepala desa sendiri sebagai sarjana Pendidikan berbeda penerapannya ketika menjadi kapitalau dan harus belajar setiap seluk beluk dunia pemerintahan dari awal.

e. Akuntabilitas

Kamus besar Bahasa Indonesia akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pada Indikator akuntabilitas merupakan ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan pemerintah desa Tapile dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pemerintah desa masih kurang akuntabel karena salah satu pertanggung jawaban mengenai anggaran dana desa yang terjadi perubahan alokasi dana dan membuat program kerja ada yang dipangkas untuk diluncurkan untuk anggaran Covid19 dari MTK/BPD sendiri belum menerima dokumen pertanggungjawaban anggaran yang diluncurkan untuk covid19 atau belum sampai di tangan kami atau bisa dikatakan tidak ada realisasi tentunya ini menjadi perhatian dari MTK/BPD harus tetap meminta pertanggung jawaban yang ada karena harus disampaikan kepada masyarakat yang dimana MTK/BPD ini merupakan pihak pemegang amanah harus bertanggung jawab kepada masyarakat agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat walaupun memang dilihat dari kondisi beberapa masyarakat yang masih apatis. Pemerintah desa memang sudah berusaha untuk bersikap akuntabel terhadap apa yang dilakukan maka dari itu dalam setiap kegiatan masyarakat selalu dilibatkan dan dari pemerintah tetap mengadakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat bisa mengerti dan tahu mengenai realisasi setiap anggaran yang ada tetapi pada nyatanya masih ada masyarakat yang tidak mau hadir ketika ada sosialisasi. Peneliti

menilai bahwa pemerintah desa memang aktif secara sosialisasi tetapi terlalu bersantai mengenai laporan pertanggung jawaban kepada MTK/BPD sendiri.

2.1. Faktor Pendukung Dan Penghambat bagi Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Kapitalau/Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi yaitu sebagai berikut ;

a. Faktor Pendukung

1. Kewibawaan dalam memimpin, kepala desa Tapile tetap ada kepedulian kepada masyarakat walaupun memang masyarakat desa Tapile belum merasa puas tetapi secara kewibawaannya tidak jatuh dimata masyarakat sehingga kepala desa tetap menjalankan perannya dan tetap menerima setiap kritikan yang ada.
2. Kekuasaan, kepala desa memiliki kekuasaan yang dipegang sehingga mampu mengendalikan dan mempengaruhi dalam memberi intruksi langsung kepada perangkat desa.

b. Faktor penghambat

1. Dana Desa yang ada mengalami pemangkasan karena untuk menangani Covid19 sehingga ada beberapa program yang dirumuskan belum bisa diwujudkan.
2. Faktor Sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja bagi peningkatan kinerja organisasi, dimana kedekatan Kapitalau/Kepala Desa Tapile dengan masyarakat hanya sekedar hubungan struktural tetapi belum secara emosional dan ini membuat masyarakat menilai kepala desa kurang bersosialisasi.

3. Faktor Politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal, dimana masyarakat desa Tapile masih berlarut dengan suasana pemilihan kepala desa/pilkades yang telah berlalu sehingga ada beberapa masyarakat bersikap apatis apa yang dilakukan pemerintah desa.

4. Faktor Geografis, dalam hal ini kondisi permukaan desa Tapile di setiap dusun atau lindongan dibatasi dengan pegunungan sehingga setiap program yang dijalankan pemerintah sendiri harus hati-hati dalam memprioritaskan program dimana akan dilaksanakan.

5. Faktor Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan dimana pemerintah desa Tapile kekurangan sumber daya manusia sehingga masih ada perangkat desa yang berijazah Sekolah Dasar.

6. Faktor Partisipasi Masyarakat, masyarakat desa Tapile di nilai kurang dalam menunjang apa yang dilakukan pemerintah secara swadaya dan dalam perencanaan program masyarakat terlalu berdiam diri.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sesuai indikator ukuran kinerja kapitalau dalam mewujudkan visi misi, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Produktivitas, bahwa pemerintah desa sudah menjalankan setiap tahapan

perencanaan dan penetapan program telah berjalan baik, kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melibatkan masyarakat atau menggunakan sumber daya manusia yang ada berjalan dengan baik akan tetapi program yang diwujudkan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat.

2. Indikator Kualitas Layanan, bahwa pemerintah desa belum optimal dalam pemberian layanan sehingga kualitas layanan yang diberikan lambat misalnya dalam urusan administrasi surat menyurat dan juga kondisi kantor desa sebagai penunjang pemberian layanan dalam kondisi tidak baik.
3. Indikator Responsivitas, pemerintah desa Tapile cukup baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat walaupun kebutuhan yang ada belum secara keseluruhan melekat pada pribadi masyarakat dan pemerintah desa dalam hal ini kurang efektif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat karena ditemukan masih ada masyarakat yang bersikap apatis dengan apa yang dilakukan serta mereka susah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide atau dalam penggalan gagasan bahkan pada musyawarah yang ada.
4. Indikator Responsibilitas, pemerintah desa Tapile dinilai kurang dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang ada, pemerintah hanya melakukan tugas begitu saja asalkan ada yang dijalankan.
5. Indikator Akuntabilitas, pemerintah desa dalam indikator ini dinilai kurang akuntabel karena salah satu pertanggung jawaban mengenai anggaran dana desa yang terjadi perubahan alokasi dana dan membuat program kerja ada yang dipangkas untuk

diluncurkan untuk anggaran Covid19 dari MTK/BPD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat sendiri belum menerima dokumen pertanggungjawaban anggaran yang dimaksud.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan dan dilihat dari hasil wawancara beberapa informan bahwa Kinerja Kapitalau dalam Mewujudkan Visi Misi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dinilai sudah baik tetapi lebih dimaksimalkan kedepannya agar bisa melihat apa yang menjadi prioritas kebutuhan utama masyarakat.

3.2. Saran

Berdasarkan

kesimpulan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja kapitalau dalam mewujudkan visi misi yang lebih baik kedepannya dibutuhkan kerja sama yang baik di setiap stakeholders terutama bagi setiap unsur masyarakat yang berpengalaman dalam hal pemerintahan untuk saling memberikan arahan atau pandangan dalam memberikan petunjuk bahkan motivasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik seperti apa.
2. Pemerintah desa dalam hal ini Kapitalau harus mengusulkan kepada pemerintah kabupaten, kecamatan atau bisa juga pendamping desa untuk diadakan pelatihan, diklat atau semacamnya untuk meningkatkan pengetahuan pentingnya memahami setiap tugas pokok dan fungsi masing-masing dan cara menggunakan fasilitas teknologi yang ada.
3. Diharapkan agar pemerintah desa kedepannya dapat memprioritaskan dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, serta lebih berusaha lagi melibatkan masyarakat.

4. Dalam kepemimpinan sebagai pemerintah desa sangat diharapkan dapat menunjukkan sifat hubungan yang baik antar perangkat desa bahkan masyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam saling menunjang setiap perencanaan program kedepannya sehingga visi misi yang sudah di programkan dapat berjalan dan terwujud dan berusaha tetap bersifat akuntabel serta transparan dalam setiap tugas dan tanggung jawab jangan hanya lewat ucapan saja ada transparansi tetapi secara pertanggung jawaban lambat membuat laporan yang ada kepada MTK/BPD yang merupakan pemegang amanat masyarakat agar masyarakat tidak salah paham akan jalannya pemerintahan.

Daftar Pustaka

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Dinarsanti Gita. 2010, *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Dwiyanto Agus. 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- H.B. Sutopo. 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Hessel, Nogi. 2005, *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana
- Mangkunegara, Prabu. 2009, *Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmudi. 2007, *Manajemen Kinerja Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Moleong, Lexy J. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021, *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. Depok : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Simanjuntak, P. J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sofar dan Widiono. 2013, *Metode Penelitian Sosial : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : In Media
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Afabeta
- Sumaryadi. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : CV Citra Utama
- Widodo, Joko. 2008, *Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing
- Widjaja. 2003, *Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sumber-Sumber Lain :

- o Kamus Besar Bahasa Indonesia
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- o Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
- o Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- o Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- o Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional